

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) dalam Kumala (2014) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dengan investor (principal). Pemilik mengharapkan return yang tinggi dari investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan. Sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi dan dipenuhinya kebutuhan psikologis mereka.

Hal ini menyebabkan timbul konflik antara manajemen dengan pemilik karena masing-masing akan memenuhi kepentingannya sendiri (*opportunistic behavioral*). Pemilik akan mengeluarkan biaya monitoring untuk mengawasi kinerja manajemen. Manajemen akan berusaha meminimalkan biaya keagenan (*agency cost*) dengan sukarela memberi informasi keuangan kepada pemilik. Manajemen memberikan laporan keuangan secara teratur dengan harapan dapat mengurangi biaya monitoring. Dasar dari teori agensi dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal untuk memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing.

Bagi para pengguna eksternal, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting karena pihak eksternal merupakan pihak yang minim akan informasi. Permasalahan yang muncul yaitu ketidaklengkapan informasi yang disampaikan pihak agen kepada prinsipal, karena informasi yang diketahui oleh kedua belah pihak tidak sama. Kondisi ketidakseimbangan informasi antara kedua belah pihak biasa disebut asimetri informasi (*information asymmetry*).

Adanya asimetri informasi memberikan peluang bagi pihak manajemen untuk melakukan *earnings management*, karena agen tidak selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Munculnya masalah agensi membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Keadaan ini dapat dikurangi dengan cara melakukan pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak didalam perusahaan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Eisenhardt (1989) dalam Hartati (2012) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasar asumsi dari Eisenhardt (1989) manajer akan cenderung bersifat oportunistik (mementingkan kepentingan pribadinya). Dengan demikian *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi tingkat menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan atau sering disebut dengan *corporate governance* meliputi hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) dengan pengelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholder* (Surya dan Yustivandana ,2008 dalam Agustia, 2013)

Dewan komisaris adalah merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Farida, 2012). Pengaruh dewan komisaris memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kinerja perusahaan.

Dewan komisaris secara umum ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Pengawasan ini penting karena adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan *earnings management* yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan terhadap investor. Untuk mengatasi tindakan *earnings management* dewan komisaris diberi akses mengenai informasi perusahaan. Karena dewan komisaris tidak diberi wewenang dalam perusahaan, maka

dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

Dewan komisaris bertugas mengawasi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Pengawasan tersebut berfungsi untuk mengurangi atau menghindari praktik manajemen laba yang akan berpengaruh pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya, dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan (Prasetya, 2016)

Komisaris independen jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris (Farida, 2012)

Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Sedang misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan (*Fairness*) diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Kriteria dewan komisaris yaitu dipilih secara independen, melakukan penilaian obyektif dan independen, kemampuan dan integritas memadai serta tidak terafiliasi dengan perusahaan.

Komisaris independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab serta menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin, tidak terpengaruh dari luar dan tekanan dari pemegang saham yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk itu komisaris independen perusahaan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi. Keberadaan komisaris independen dapat mengurangi kecurangan atau manipulasi laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang tinggi dalam perusahaan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan (Fachrony, 2015)

3. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana auditor dapat melaporkan temuannya dengan baik atau tidak adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya (Putra, 2012). Seorang auditor harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, karena auditor merupakan

pihak yang memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan tersebut.

Auditor yang berkualitas adalah auditor yang bisa memberikan informasi yang akurat. Informasi yang akurat adalah informasi yang bisa dengan tepat menunjukkan nilai perusahaan. Auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil karena jika KAP yang besar tidak menyajikan kualitas audit yang tinggi maka KAP tersebut akan kehilangan reputasinya (Fitria, 2013)

Tujuan dari audit terhadap laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai kualitas dari laporan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kualitas dari laporan keuangan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil suatu keputusan untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP. Auditor yang bekerja di KAP *big four* lebih berkualitas karena auditornya tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non big four* (Miati dan Rasmini, 2016). Dengan adanya kualitas audit ini, auditor akan dengan mudah menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga akan lebih meningkatkan integritas laporan keuangan.

4. *Leverage*

Leverage merupakan besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan semakin tingginya risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Perusahaan cenderung akan menampilkan kinerja yang baik guna memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.

leverage merupakan bentuk lain dari risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat penggunaan hutang. Semakin banyak perusahaan menggunakan hutang maka semakin tinggi financial *leverage*-nya. Ini berarti juga semakin tinggi risiko finansial yang melekat pada perusahaan tersebut. Akibatnya prospek perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menurun (Budileksmana dan Andriani, 2005).

Tingkat *leverage* dapat diketahui dengan cara membandingkan total hutang dengan total aset. Menurut Agustia (2013), rasio *leverage* merupakan rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal, atau dapat juga menunjukkan beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang.

Leverage menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan hutang yang dimiliki perusahaan. Semakin besar *leverage* menunjukkan semakin besar resiko investasi sedangkan semakin rendah *leverage* menunjukkan semakin kecil resiko investasi. *Leverage* mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, ketika perusahaan mempunyai rasio

leverage yang tinggi maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar hutangnya tepat waktu (Yamaditya 2014).

5. Manajemen Laba

Praktik manajemen laba (*earnings management*) secara umum didefinisikan sebagai tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Kumala, 2014). Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak memcerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

manajemen laba terjadi ketika manajer membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi jumlah laba yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagian *stakeholders* atau keputusan *stakeholder* untuk menanamkan sahamnya

Wangi (2010) dalam Fachrony (2015) mengusulkan tiga hipotesis yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yaitu sebagai berikut:

- a. Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plan Hypotesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer pada perusahaan yang menerapkan bonus lebih cenderung untuk menggunakan metode atau prosedur-prosedur akuntansi yang akan menaikkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

- b. Hipotesis Perjanjian Liabilitas (*Debt Covenant Hypotesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* besar atau menghadapi kesulitan liabilitas, maka manajer perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba.
- c. Hipotesis Kos Politis (*Political Cost Hypotesis*). Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan maka manajer cenderung untuk menanggihkan laba berjalan ke masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dihasilkan tidak mencerminkan nilai atau kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dalam Djatu (2013) dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa mendatang.

- b. *Income Minimization* Dilakukan saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Adapun teknik manajemen laba menurut Agustina (2013) tiga teknik dalam melakukan manajemen laba adalah:

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain

b. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode biaya dan pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan

sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampe periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

B. Penurunann Hipotesis

1. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Dewan komisaris independen bertugas untuk memastikan terlaksananya prinsip *good corporate governance* dengan melakukan pemantauan pada perusahaan tersebut. Pemantauan tersebut meliputi pemantauan anggaran, jadwal, dan efektivitas strategi. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Fauziyah, 2014).

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang memenuhi *good corporate governance*. Dengan demikian, tingkat pengungkapan informasi yang lebih tinggi dan tidak memihak diharapkan dapat mengurangi resiko kecurangan yang dapat dilakukan manajemen terhadap laporan keuangan sehingga dalam hal ini komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Fungsi lain dewan komisaris adalah memastikan perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian Natalia (2013) menyebutkan bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini dikarenakan komisaris independen ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas dalam RUPS sehingga apabila tidak sejalan dengan keputusan pemilik maka perusahaan dapat melakukan pergantian.

Penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) yang menunjukkan bahwa Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba. Independensi Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsinya secara optimal yaitu fungsi *monitoring* (pengawasan) terhadap manajemen. Fungsi *monitoring* tersebut adalah untuk memastikan perusahaan

melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder pada perusahaan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Djatu (2013) membuktikan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti makin banyak komisaris independen maka semakin kecil terjadinya manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Independensi Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Komite audit memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan serta berperan menegakkan prinsip *good corporate governance* pada perusahaan (Prabowo, 2014)

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan

komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan (Fachrony, 2015). Semakin banyak jumlah komite audit akan menurunkan manajemen laba dikarenakan semakin banyak komite audit maka akan menambah atau meningkatkan keahlian komite audit yang berdampak pada berkurangnya kegiatan manajemen laba di suatu perusahaan

Mahmudah (2013) menyebutkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba. Jumlah komite audit yang semakin banyak dinilai justru akan meningkatkan manajemen laba.

Penelitian oleh Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) menemukan bahwa komite audit negatif terhadap manajemen, kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Gradiyanto (2012) juga membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin banyak jumlah komite audit akan semakin menekan praktik manajemen laba pada perusahaan tersebut. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Jumlah komite Audit Berpengaruh negatif Terhadap Manajemen Laba

3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba

Auditor yang berkualitas adalah auditor yang bisa memberikan informasi yang akurat. Informasi yang akurat adalah informasi yang bisa dengan tepat menunjukkan nilai perusahaan. DeAngelo (1981) dalam Fitria

(2013) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang akan dilakukan oleh auditornya. Auditor yang bekerja di KAP *big four* dianggap lebih berkualitas karena auditornya tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non big four* (Miati dan Rasmini, 2016).

Wiryadi dan Sebrina (2013) menyebutkan kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP *Big Four* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Praktik manajemen laba terjadi karena perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus dimata calon investor, namun mengabaikan keberadaan auditor *Big four*. Sejalan dengan penelitian Wiryadi dan Sebrina (2013), Pambudi dan sumantri (2014) serta Pradhana dan Rudiawarni (2013) menyebutkan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP *Big Four* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. KAP *Big four* dinilai tidak dapat memperkecil praktik manajemen laba pada perusahaan.

Herusetya (2012) menyebutkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kualitas audit akan semakin rendah *absolute discretionary accruals* yang

terjadi di suatu perusahaan. Auditor dari KAP *Big Four* dinilai lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *Non Big Four*. Pengujian menggunakan *single proxy* dari kualitas audit membuktikan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*.

Ratmono (2010) menyatakan bahwa auditor yang berkualitas mampu mendeteksi tindakan manajemen laba yang dilakukan klien. Jasa audit merupakan alat *monitoring* terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer serta antara pemegang saham dengan jumlah kepemilikan yang berbeda. Hal ini berarti kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat (Pasaribu dkk, 2015) Di dalam teori keagenan, terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi

konflik sehingga manajemen cenderung melakukan manajemen laba yang berdampak pada kualitas laba yang dilaporkan (Agustia, 2013).

Elfira (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Rata rata aset yang dibiayai hutang dalam perusahaan adalah 50% (lima puluh persen), perusahaan dikatakan aman karena masih dapat membayar hutang dengan harta yaang perusahaan miliki. Dengan demikian perusahaan dengan *leverage* tinggi tidak akan mempengaruhi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Elfira (2014), Putro (2016) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. *Leverage* yang tinggi tidak memancing manajer untuk melakukan manajemen laba, karena pemenuhan kewajiban tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba.

Menurut Wijaya dan Christiawan (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang memiliki hutang dalam jumlah besar akan melakukan manajemen laba karena perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan terancam *default*, sehingga manajer cenderung melakukan praktik manajemen.

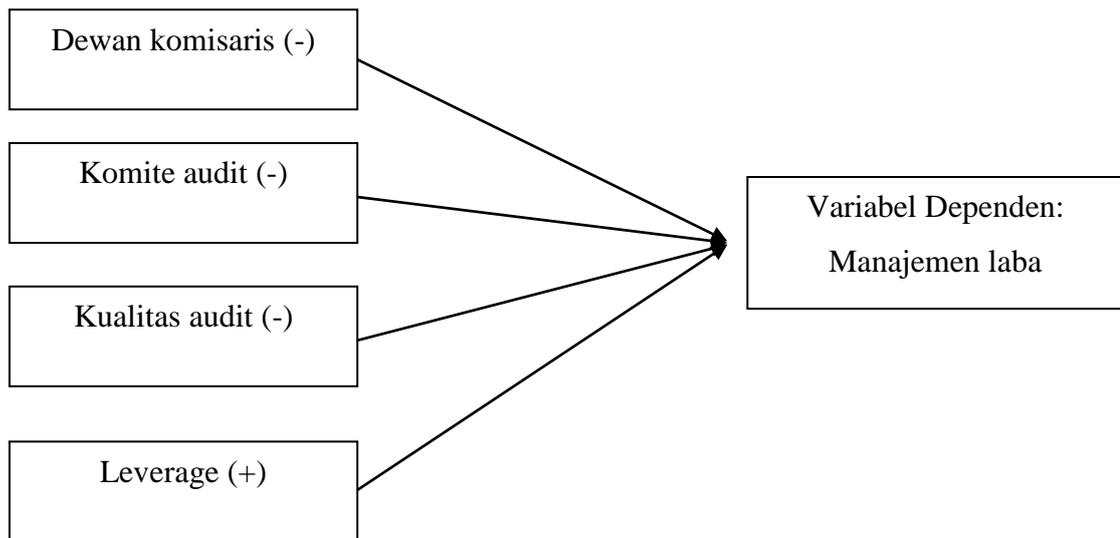
Sejalan dengan Wijaya dan Christiawan (2014), Shanti dan Yudhanti (2007) dalam Purwanti (2012) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Peneliti menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akibat besarnya liabilitas dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar liabilitas

pada waktunya. Hal ini berarti *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba

C. Model Penelitian

Variabel Independen



Gambar 2.1

Model Penelitian Analisis Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba